

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abdul Khakim. (2017). *Aspek Hukum Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. (2004). *Pengantar Metode Pengkajian Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Budiono, H. (2015). *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Danang Sunyoto. *Hak dan Kewajiban bagi Pekerja dan Pengusaha*. Gramedia, Jakarta.
- Arifuddin Muda Harahap. (2020). *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. Literasi Nusantara, Malang.
- F.X. Djumialdji. (2006). *Perjanjian Kerja*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Hardani, dkk. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Pustaka Ilmu Group, Yogyakarta.
- Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. (2019). *Buku Panduan Tugas Akhir*. Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe.
- Harahap, M. Y. (2015). *Hukum Acara Perdata*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Hernoko, A. Y. (2014). *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. (2017). *Penelitian Hukum*. Kencana, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. (2014). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Prodjodikoro, W. (2011). *Azas-Azas Hukum Perjanjian*. Mandar Maju, Bandung.
- Salim H.S. (2003). *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji. (2001). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Subekti, R. (2014). *Hukum Perjanjian*. Intermasa, Jakarta. Sugiyono dan R&D, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Alfabeta*, Bandung

B. JURNAL, SKRIPSI DAN ARTIKEL ILMIAH LAINNYA

- Attallah, O. *et al.* (2024). "Optimalisasi Kebijakan Ketenagakerjaan Untuk Mengatasi Dampak PHK Massal Dan Meningkatkan Perlindungan Pekerja." *Media Hukum Indonesia*, 2(4), 643–654.
<https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/955>

- Azhar, F. *et al.* (2021). "Analisis Hukum Putusan No. 29/PDT.G/2019/PN SGM Tentang Kekuatan Pembuktian Pada Perkara Perdata." *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 1–15. <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/qawaninjih/article/view/338>
- Dewangga, S. A. *et al.* (2024). "Perbedaan Makna Alasan PHK: Implikasi Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Dan Kewajiban Perusahaan." *The Juris*, 8(1), 1–8. <https://doi.org/10.56301/juris.v8i1.1154>
- Dewi, A. M. *et al.* (2025). "Perlindungan Hukum Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Di Temanggung." *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia*, 2(2), 134–145. <https://doi.org/10.62383/majelis.v2i2.678>
- Fathammubina, R. *et al.* (2018). "Perlindungan Hukum Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Bagi Pekerja." *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum*, 3(1), 108–130. <https://doi.org/10.35706/dejure.v3i1.1889>
- Hakim, D. A. (2016). "Urgensi Penerapan Corporate Social Responsibility Sebagai Upaya Menjamin Hak-Hak Tenaga Kerja." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(4), 623–646. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no4.802>
- Hananto, M. R. *et al.* (2024). "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Pada Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Oleh Perusahaan (Studi Putusan Nomor 361/PDT.SUS PHI/2023/PN.JKT.PST)." *UNES Law Review*, 6(4), 10711–10722. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2047>
- Hetiyasari. (2022). "Pertanggungjawaban Hukum Bagi Perusahaan Atas Batalnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Di Masa Pandemi COVID-19." *Jurnal USM Law Review*, 5(1), 331–341. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4807>
- Josviranto, M. (2022). "Tinjauan Yuridis Perusahaan Dalam Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan." *Briliant: Jurnal Riset Dan Konseptual*, 7(1), 165–170. <https://doi.org/10.28926/briliant.v7i1.895>
- Kaffah, A. R. (2021). "Pemberian Pesangon Akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Di Masa Pandemi COVID-19 (Studi: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003)." *Hukum Dan Masyarakat Madani*, 11(2), 224–236. <https://doi.org/10.26623/humani.v11i2.3025>
- Kurniawan, F. *et al.* (2020). "Problematisa Pembentukan RUU Cipta Kerja Dengan Konsep Omnibus Law Pada Klaster Ketenagakerjaan Pasal 89 Angka 45 Tentang Pemberian Pesangon Kepada Pekerja Yang Di-PHK." *Jurnal Panorama Hukum*, 5(1), 63–76. <https://doi.org/10.21067/jph.v5i1.4437>
- Kusuma, R. *et al.* (2022). "Hak Pekerja Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021." *The Juris*, 6(2), 325–332. <https://doi.org/10.56301/juris.v6i2.599>
- Mentari, C. C. S. *et al.* (2026). "Pembuktian Dalam Hukum Acara Perdata: Konsep, Pengaturan, Beban Pembuktian, Dan Alat-Alat Bukti." *Integrative*

Perspectives Of Social And Science Journal, 3(3), 1100–1111.
<https://ipssj.com/index.php/ojs/article/view/1227>

Neysa, P. M. A. *et al.* (2020). “Pengaturan Pemberian Pesangon Bagi Pekerja Yang Mengalami PHK Pada Masa Pandemi COVID-19.” *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 8(11), 1761–1772.
<https://doi.org/10.24843/KS.2020.v08.i11.p09>

Purnomo *et al.* (2022). “Akibat Hukum Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak Oleh Pengusaha.” *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana*, 4(1), 49–58.
<https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v4i1.460>

Simarmata, M. K. *et al.* (2024). “Analisis Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak Dengan Perjanjian Kerja Kemitraan Menurut Hukum Ketenagakerjaan.” *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(5), 1–15.
<https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/679>

Sinlae, E. S. P. *et al.* (2024). “Perspektif Hukum Mengenai Pembayaran Pesangon Kepada Pekerja Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sepihak.” *Indonesian Journal Of Islamic Jurisprudence, Economic And Legal Theory*, 2(1), 71–82. <https://doi.org/10.62976/ijijel.v2i1.337>

Suwadji, Y. T. (2019). “Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Melalui Perundingan Bipartit.” *Jurnal Ketenagakerjaan*, 14(2), 83–97.
<https://journals.kemnaker.go.id/index.php/naker/article/view/57>

Thoif, M. (2022). “Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Terhadap Karyawan Terdampak Pandemi COVID-19.” *Perspektif Hukum*, 22(2), 265–285.
<https://doi.org/10.30649/ph.v22i2.125>

Trixie, I. *et al.* (2023). “Implementasi Hak Para Pekerja Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Analisis Kasus PT Livatech Elektronik Indonesia).” *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 2000–2008. <https://doi.org/10.31316/jk.v7i2.5578>

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

D. WEB DAN INTERNET

<https://www.gatra.com/news-513267-hukum-tak-bayar-pesangon-pengadilan-sita-aset-perusahaan.html>.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-perundingan-bipartit-dalam-persoalan-hubungan-industrial-lt64c1107b5afe6/>, Memaemahami Perundingan Bipartit dalam Persoalan Hubungan Industrial, Hukum Online.com.

https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/publication_detail/95/memotret-pertimbangan-putusan-hakim-dari-berbagai-perspektif, *Memotret
Pertimbangan Putusan Hakim dari Berbagai Perspektif*,
Komisiyudisial.go.id.